

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua aspek krusial yang harus dicapai secara bersamaan. Keduanya kerap menghadapi *trade-off* dimana apabila pemerataan menjadi prioritas laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi didorong secara lebih intensif, maka peluang terjadinya ketimpangan pendapatan akan meningkat (Sukmawati & Robertus, 2023).

Ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan yang sering muncul dalam proses pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pencapaian pertumbuhan tinggi. Dalam perencanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang pesat kerap diasumsikan menghasilkan *trickle down effect*, yaitu mekanisme dimana manfaat pembangunan secara bertahap mengalir dari kelompok berpendapatan tinggi kepada kelompok berpendapatan rendah (Widodo et al., 2022). Namun demikian, asumsi tersebut mengabaikan bagaimana hasil pertumbuhan terdistribusi secara merata di antara lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya disertai pemerataan hasil pembangunan. Orientasi pembangunan yang masih menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan menyebabkan manfaat ekonomi lebih banyak terakumulasi pada kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok berpendapatan rendah belum memperoleh dampak yang sebanding. Kondisi ini mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat tetap bertahan. Oleh

karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan agar lebih merata pada lintas sektor dan kelompok pendapatan, sehingga tidak hanya mendorong peningkatan output, tetapi juga mengurangi ketimpangan yang berpotensi menimbulkan masalah sosial (Badriah, 2019).

Secara spasial, aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya Pulau Jawa yang hingga kini menjadi pusat utama kegiatan industri, perdagangan, dan jasa nasional. Namun konsentrasi aktivitas ekonomi tidak serta-merta menghasilkan pemerataan pendapatan, ketimpangan di Pulau Jawa justru lebih tinggi dibandingkan wilayah luar Jawa. Masalah ketimpangan terjadi di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa. Data distribusi pengeluaran penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi menguasai 44,95 persen total pengeluaran, sementara 40 persen penduduk berpenghasilan rendah hanya menikmati 18,9 persen. Hal ini mengindikasikan adanya indikasi *trickle-up effect* dalam proses pembangunan, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi justru semakin terkonsentrasi pada kelompok atas dan belum mengalir secara merata ke seluruh lapisan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045, menjelaskan bahwa dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat ketimpangan, serta meningkatkan kinerja pertumbuhan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal di Jawa Tengah, ditetapkan strategi pembagian wilayah pengembangan. Pembagian wilayah dilakukan dengan mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan kesamaan karakteristik, pola

interaksi dan mobilitas antarwilayah.

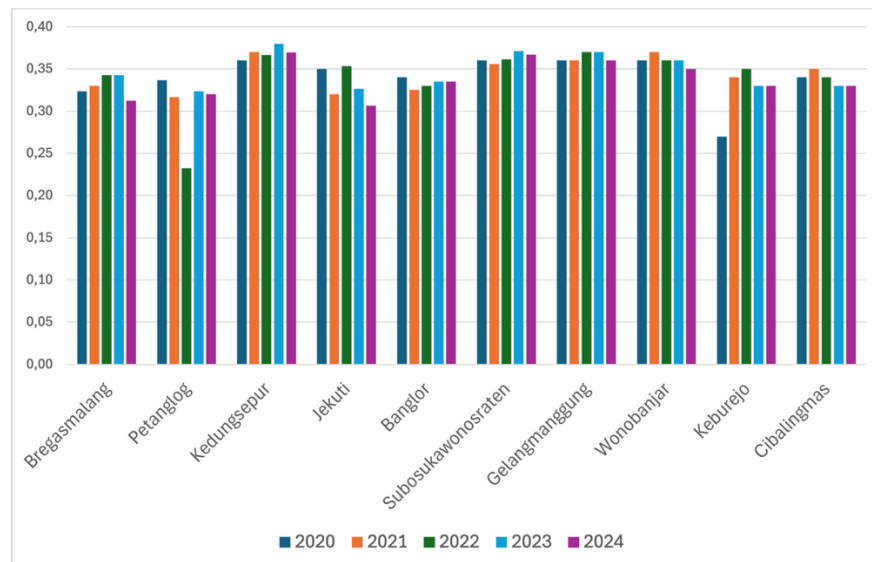
Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sejalan dengan perencanaan dalam dokumen penataan ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029–2039, terdapat 8 Wilayah Pengembangan sebagai acuan struktural pembangunan daerah. Selanjutnya, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 terdapat perubahan pembagian wilayah pengembangan menjadi 10 wilayah meliputi:

1. Wilayah Pengembangan Kedungsepur (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan);
2. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab. Klaten);
3. Wilayah Pengembangan Petanglong (Kab. Pekalongan, Kab. Batang, dan Kota Pekalongan);
4. Wilayah Pengembangan Bergasmalang (Kab. Brebes, Kota Tegal, Kab. Tegal, dan Kab. Pemalang);
5. Wilayah Pengembangan Wanarakuti (Kab. Jepara, Kab. Kudus, dan Kab. Pati);
6. Wilayah Pengembangan Banglor (Kab. Rembang dan Kab. Blora).
7. Wilayah Pengembangan Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung);
8. Wilayah Pengembangan Wonobanjar (Kab. Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara);

9. Wilayah Pengembangan Keburejo (Kab. Kebumen dan Kab. Purworejo);
10. Wilayah Pengembangan Cibalingmas (Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga dan Kab. Banyumas).

Dalam konteks pembagian wilayah pengembangan tersebut, kondisi ketimpangan pendapatan di masing-masing wilayah tentu tidak seragam. Setiap wilayah pengembangan memiliki karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda, sehingga pola distribusi pendapatan yang terbentuk pun beragam. Perbedaan ini penting untuk dipahami secara lebih mendalam, mengingat strategi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD Jawa Tengah 2025–2045 bertujuan untuk mendorong pemerataan antar wilayah. Untuk melihat bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan di masing-masing wilayah pengembangan selama periode pengamatan, berikut ini data indeks gini pada setiap wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar 1. 1 Indeks Gini Wilayah Pengembangan Jawa Tengah 2020-2024**



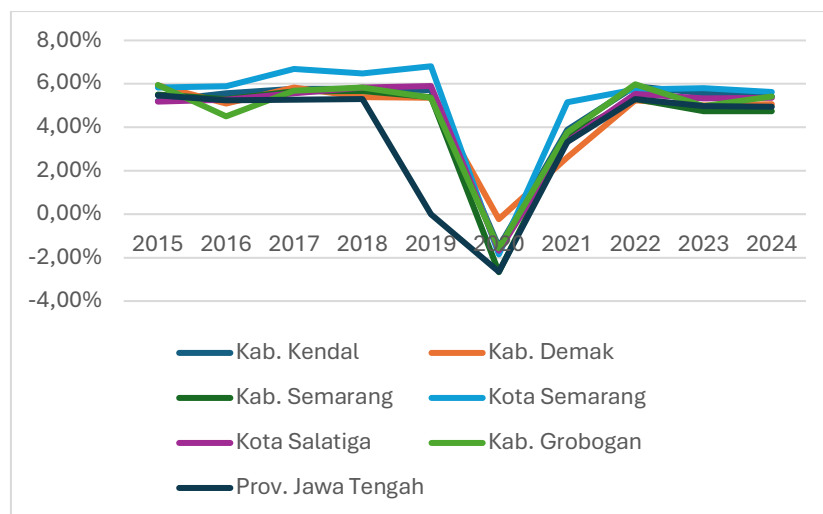
Sumber: Data BPS, 2024

Berdasarkan Gambar 1.1, wilayah pengembangan Kedungsepur secara konsisten mencatatkan rata-rata rasio gini tertinggi dibandingkan wilayah

pengembangan lainnya di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020–2024, dengan nilai yang bergerak di kisaran 0,36–0,38. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat wilayah Kedungsepur sebagai pusat aglomerasi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, namun tingginya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Wilayah Pengembangan Kedungsepur merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Jawa Tengah yang berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai kawasan strategis, Kedungsepur mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten melampaui rata-rata Provinsi Jawa Tengah sepanjang periode pengamatan.

**Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pengembangan Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah 2015-2024**



Sumber: Data BPS, 2024

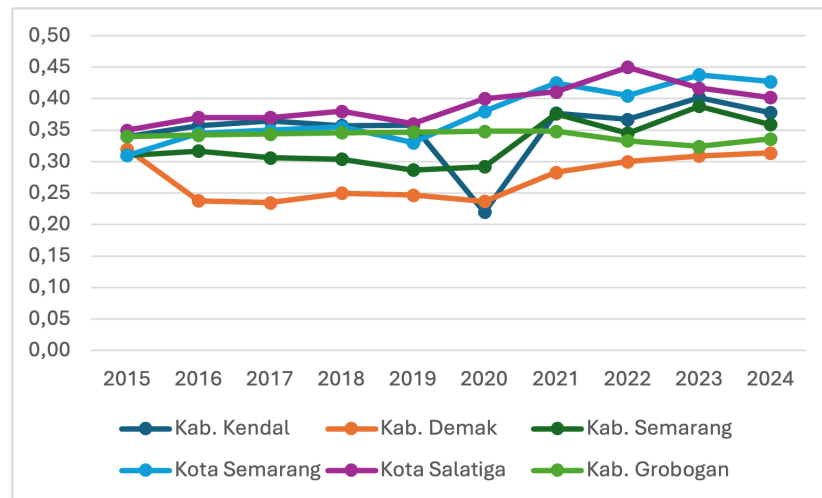
Berdasarkan Gambar 1.2 rata-rata pertumbuhan ekonomi Wilayah Pengembangan Kedungsepur konsisten melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, bergerak secara fluktuatif sepanjang periode pengamatan dengan kontraksi paling signifikan terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Wilayah

Pengembangan Kedungsepur belum mampu menekan ketimpangan pendapatan secara konsisten. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang ideal seharusnya diiringi oleh pemerataan distribusi pendapatan ke seluruh lapisan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya pertumbuhan ekonomi di kawasan ini berjalan seiring dengan semakin melebarnya indeks gini dari tahun ke tahun.

Pembahasan mengenai ketimpangan pendapatan secara umum didasarkan pada asumsi bahwa tingkat pendapatan masyarakat dapat direpresentasikan melalui kemampuan mereka dalam melakukan transaksi ekonomi. Pendekatan ini diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan akurasi dalam pengukuran, mengingat masyarakat cenderung enggan mengungkapkan informasi pendapatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, data pengeluaran dianggap lebih dapat dipercaya karena lebih mampu mencerminkan kapasitas konsumsi rumah tangga terhadap barang dan jasa (Chayyani, 2021).

Berdasarkan data distribusi pengeluaran penduduk tahun 2024, kondisi di Wilayah Pengembangan Kedungsepur menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata. Rata-rata 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi menguasai sekitar 44,77 persen pengeluaran, sementara 40 persen penduduk berpenghasilan rendah hanya menikmati sekitar 18,51 persen. Kondisi ketimpangan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur dapat dilihat lebih jelas melalui perkembangan indeks Gini masing-masing wilayah sepanjang periode pengamatan.

**Gambar 1. 3 Indeks Gini Kedungsepur 2015-2024**

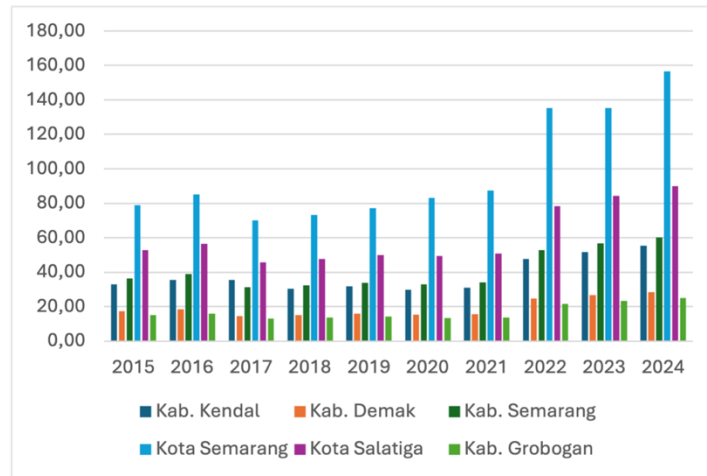


Sumber: Data BPS, 2024

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pelebaran indeks gini di Wilayah Pengembangan Kedungsepur semakin nyata dari tahun ke tahun, terlebih setelah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dampaknya lebih terasa di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang dan Kota Salatiga. Menariknya, meskipun kedua kota tersebut menjadi penyumbang PDRB terbesar di wilayah Kedungsepur, justru di sinilah ketimpangan pendapatan tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten di sekitarnya.

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah (Fauzia & Suseno, 2017). Upaya peningkatan pembangunan ekonomi umumnya diarahkan pada kenaikan pendapatan per kapita yang dalam konteks ini juga berperan sebagai salah satu determinan penting yang memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan (Todaro & Smith, 2020).

**Gambar 1. 4 Pendapatan per Kapita Kedungsepur 2015-2024**



Sumber: Data BPS, 2024

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Wilayah Kedungsepur selama periode 2015–2024 mengalami peningkatan yang konsisten di semua kabupaten/kota. Namun, peningkatan tersebut tidak merata dimana Kota Semarang tetap berada pada posisi tertinggi, diikuti oleh Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan yang berada pada posisi paling rendah. Urutan ini menggambarkan bahwa perekonomian kawasan cenderung bertumpu pada pusat kota, sementara wilayah lain masih berada jauh di bawahnya.

Peningkatan pendapatan perkapita pada dasarnya mencerminkan adanya kemajuan ekonomi di kawasan tersebut, namun belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh yang tercermin dari indikator ketimpangan. Peningkatan pendapatan yang ideal seharusnya diiringi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata guna mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin (Amri, 2017).

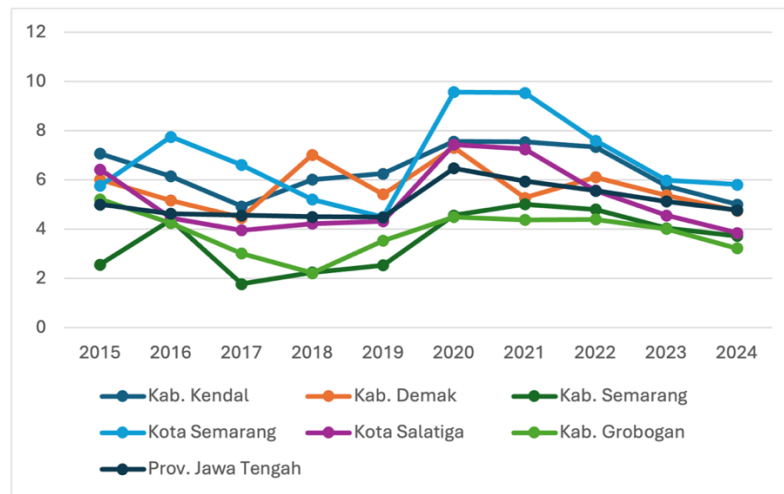
Hal ini dapat dipahami melalui mekanisme *trickle-down effect* yang mengasumsikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dari sisi permintaan dan

penawaran akan mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam praktiknya mekanisme tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pembangunan yang cenderung berfokus pada sektor-sektor tertentu dan kurang terintegrasi secara komprehensif justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan. Apabila ketimpangan ini tidak ini tidak ditangani dengan tepat, maka akan berpengaruh pada meningkatnya disparitas sosial ekonomi, menurunnya efisiensi ekonomi, serta melemahnya stabilitas dan solidaritas sosial dalam masyarakat (Saputra, 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali mengakibatkan peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan jika tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap laju pertumbuhan penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi. Sebagai ilustrasi, apabila tingkat pertumbuhan penduduk melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi, khususnya jika disertai dengan tingginya jumlah pengangguran, maka jumlah individu yang tidak memperoleh pendapatan atau upah akan meningkat secara signifikan (Hariani, 2019). Kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah pun semakin melebar, yang pada gilirannya memperburuk kondisi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat.

Akses terhadap pekerjaan yang layak berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di suatu wilayah. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja pada sektor yang produktif dengan pendapatan yang memadai, distribusi kesejahteraan cenderung lebih merata. Sebaliknya, tingginya partisipasi angkatan kerja dan terbatasnya lapangan kerja dapat memperbesar ketimpangan karena sebagian masyarakat hanya dapat mengakses pekerjaan berupah rendah, tidak tetap, atau tidak sesuai dengan keterampilannya (Hindun et al., 2019).

**Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kedungsepur 2015-2024**



Sumber: Data BPS, 2024

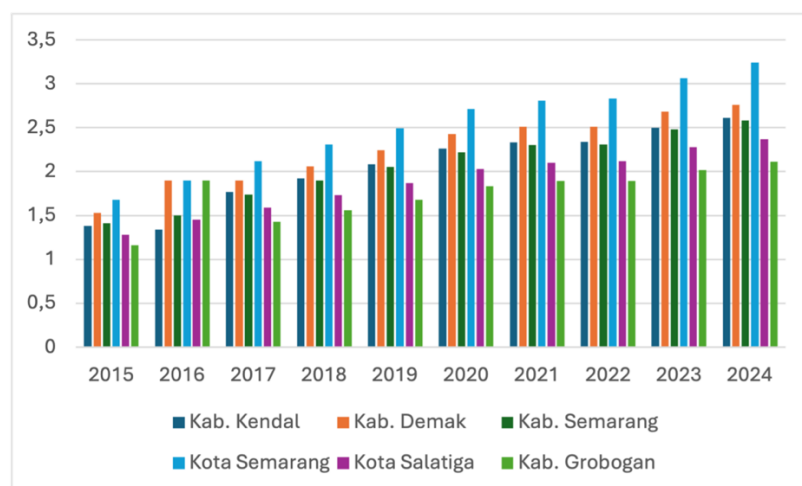
Berdasarkan gambar 1.5 memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kedungsepur menunjukkan pola yang berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah seperti Kota Semarang dan Kabupaten Kendal berjalan seiring dengan indeks Gini yang cenderung meningkat, mengindikasikan bahwa belum terselesaikannya persoalan pengangguran turut berkontribusi pada melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan di kawasan ini. Selain itu, jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi Jawa Tengah, beberapa wilayah Kedungsepur seperti Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Kendal secara konsisten berada di angka yang lebih tinggi. Dalam 10 tahun terakhir, wilayah-wilayah tersebut hampir selalu berada di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah sering kali berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang berlangsung lambat dan tidak merata antarwilayah.

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dapat memperketat persaingan di pasar tenaga kerja, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan rendah. Akibatnya, kelompok masyarakat yang lebih rentan, khususnya pekerja dengan keterampilan terbatas, cenderung mengalami penurunan pendapatan dan pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan (Nadya & Syafri, 2019).

Ketimpangan pendapatan salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum. Kebijakan ini bisa mengubah distribusi upah melalui dua sisi. Pertama, ada dampak langsung ketika pekerja yang sebelumnya menerima upah di bawah standar akhirnya harus disesuaikan hingga mencapai upah minimum. Kedua, terdapat dampak yang bersifat tidak langsung, yakni ketika kebijakan upah minimum turut memicu penyesuaian upah bagi tenaga kerja yang penghasilannya sudah berada sedikit di atas ambang batas yang ditetapkan. (Campolieti, 2015). Kedua efek ini pada akhirnya berkontribusi terhadap bagaimana upah terbentuk dan seberapa besar ketimpangan pendapatan yang muncul di suatu wilayah.

**Gambar 1. 6 UMK Kedungsepur 2015-2024**



Sumber: Data BPS, 2024

Berdasarkan Gambar 1.6 UMK di seluruh wilayah Kedungsepur mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan Kota Semarang sebagai wilayah dengan UMK tertinggi dan Kabupaten Grobogan sebagai yang terendah. Wilayah dengan UMK tinggi seperti Kota Semarang justru mencatatkan indeks gini yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten dengan UMK lebih rendah seperti Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Kondisi ini dapat dijelaskan dari dua sisi. Di satu sisi, tingginya upah minimum di wilayah perkotaan menarik masuknya tenaga kerja dari berbagai daerah sehingga persaingan di pasar kerja semakin ketat dan tidak semua tenaga kerja mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi tersebut. Di sisi lain, wilayah dengan UMK rendah seperti Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak cenderung mencatatkan ketimpangan yang relatif rendah bukan karena pendapatannya terdistribusi secara merata, melainkan karena sebagian besar penduduknya terkonsentrasi pada kelompok pendapatan rendah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor sosial ekonomi dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Attaqi Bs (2023) menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di enam provinsi di Pulau Jawa. Selanjutnya, Aisyah & Sishadiyati (2024) menyatakan bahwa PDRB per kapita memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di wilayah Surabaya Raya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Istikharoh dkk. (2020) menunjukkan bahwa upah minimum regional kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Merujuk pada kajian-kajian terdahulu, variabel yang

digunakan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan umumnya berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sosial ekonomi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang di dalamnya terkandung proses perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, serta kelembagaan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang bersifat multidimensi (Maryani & Nainggolan, 2019). Kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat dapat tercermin antara lain melalui situasi ketenagakerjaan, tingkat pendapatan, dan standar pengupahan yang berlaku. Dalam konteks ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan ekonomi, pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat di suatu wilayah, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merepresentasikan standar kelayakan hidup minimum yang ditetapkan secara institusional. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama membentuk gambaran kondisi sosial ekonomi yang secara logis berkaitan dengan pola distribusi pendapatan masyarakat.

Meskipun determinan ketimpangan pendapatan mencakup berbagai faktor yang luas, penelitian ini secara spesifik berfokus pada Tingkat Pengangguran Terbuka, pendapatan per kapita, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Pemilihan ketiga variabel ini didasarkan pada relevansinya dengan karakteristik sosial ekonomi Wilayah Pengembangan Kedungsepur, di mana variasi antarkabupaten/kota pada aspek ketenagakerjaan, pendapatan, dan pengupahan dinilai paling mencerminkan dinamika ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah ini. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut dipandang lebih mampu

menangkap kondisi riil ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur secara tepat dan representatif.

Kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dengan menggunakan indeks gini sebagai indikatornya masih sangat terbatas. Hal ini menjadi semakin menarik mengingat adanya fenomena yang patut dicermati, di mana kondisi sosial ekonomi yang menunjukkan perbaikan seperti TPT yang cenderung menurun, pendapatan per kapita yang terus meningkat, serta UMK yang naik setiap tahunnya justru tidak diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan di wilayah ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur menggunakan indeks gini sebagai indikator ketimpangan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan empiris yang menjadi dasar perancangan kebijakan pembangunan yang lebih adil, tepat, dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur?
2. Apakah ada pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur?

3. Apakah ada pengaruh upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan. Maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah kajian mencakup beberapa kabupaten/kota yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Fokus utama penelitian adalah variabel ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat, sementara variabel bebas yang dikaji meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan per Kapita, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian ilmu ekonomi regional, khususnya dalam memahami faktor-faktor sosial ekonomi yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Penelitian ini juga bertujuan memperluas literatur tentang analisis ketimpangan pendapatan dengan pendekatan spasial dan metodologi yang sesuai.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi valid dan berbasis data empiris yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih adil dan inklusif di Wilayah Pengembangan Kedungsepur. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap faktor-faktor penyebab ketimpangan, strategi penanggulangan ketimpangan pendapatan dapat ditetapkan secara efektif dan berkelanjutan.

### 3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan pembanding bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian ketimpangan pendapatan regional, sekaligus landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan variasi metodologi maupun penambahan variabel guna memperdalam analisis dinamika ketimpangan pendapatan wilayah.